

JURNAL KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran BPJS di Kelurahan Benda Baru

¹Noor Latifah A, ²Wafa Nabila, ³Fini Fajrini

^{1,2,3}Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419
Email :tiefa85@gmail.com, wafanabila@gmail.com, f_fajrini@yahoo.com

ABSTRAK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan penyelenggara yang kepesertaannya bersifat wajib sebagaimana tertuang dalam UU No.40 Tahun 2004. Di wilayah Banten, Kota Tangerang Selatan menduduki peringkat ke-2 sebagai wilayah dengan peserta BPJS terbanyak memiliki tunggakan dalam pembayaran BPJS di mana Kecamatan Pamulang memiliki jumlah tunggakan tertinggi yaitu 32.484 jiwa dan Kelurahan Benda Baru memiliki jumlah tunggakan tertinggi sebesar 4.586 jiwa. Iuran sangat berpengaruh terhadap kelancaran berjalannya BPJS Kesehatan agar tidak terjadi defisit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang Memengaruhi kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS di Kelurahan Benda Baru. Penelitian dilakukan di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan pada bulan Juli-Agustus Tahun 2019. Sampel yang diambil adalah peserta BPJS mandiri sebanyak 102 orang. Desain penelitian menggunakan *cross sectional* dengan teknik pengambilan data *purposive sampling*. Analisis dilakukan dengan uji univariat dan bivariat dengan uji *chi-square*. Ada hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS ($p\text{-value} = 0,000$). Perlu adanya sosialisasi secara rutin dari petugas BPJS Kesehatan mengenai informasi pembayaran iuran tepat waktu.

Kata Kunci : Kepatuhan, Iuran, BPJS

ABSTRACT

BPJS is a Social Security Organizing whose membership is mandatory as stipulated in Law No. 40 of 2004. In Banten, South Tangerang City was ranked 2nd as the region with the most BPJS participants having arrears in BPJS payments where Pamulang Subdistrict had the highest number of arrears of 32,484 people and Benda Baru Village had the highest arrears amounting to 4,586 inhabitants. Contributions greatly affect the running of the Health BPJS to avoid a deficit. The goal for the research is knowing the factors related to the compliance of independent participants in paying BPJS contributions in Benda Baru Village. The study was conducted in Benda Baru Village, Pamulang Subdistrict, South Tangerang City in July-August 2019. Samples taken were 102 independent BPJS participants. The study design used cross sectional with purposive sampling data collection techniques. Analyzes were performed with univariate and bivariate tests with chi-square test. There is a relationship between knowledge and compliance of independent participants in paying BPJS contributions ($p\text{-value} = 0,000$). There is a need for regular outreach from the BPJS Health officer regarding timely payment of payment information.

Keywords : Obedience, Dues, BPJS

Pendahuluan

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia tertuang pada Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang adanya jaminan sosial yang diwajibkan bagi seluruh penduduk Indonesia yang disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN diberikan kepada peserta yang telah membayar iuran, baik secara pribadi maupun oleh pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan program jaminan kesehatan.¹

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikelola oleh Badan Penyelenggara asuransi kesehatan yang berbentuk Perseroan Terbatas, yakni PT. Askes. BPJS Kesehatan ini bersifat nirlaba, kegotongroyongan, portabilitas, serta memiliki tata kelola yang baik (*good governance*) : keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisien dan efektif dibandingkan PT. Askes yang bersifat profit. Cakupan peserta BPJS Kesehatan pun berbeda dengan PT. Askes karena kepesertaannya bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga cakupannya universal (*universal coverage*).²

Jaminan Kesehatan merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah setiap bulan secara teratur untuk program jaminan kesehatan. Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan, pendaftaran kepesertaan BPJS maksimal tanggal 1 Januari 2019.³ Ada 2 (dua) kelompok kepesertaan, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terdiri dari orang tidak mampu dan fakir miskin, dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran

(Non-PBI) yang terdiri dari pekerja mandiri (bukan menerima upah), mendapatkan penghasilan dari usahanya sendiri.^{4,3}

Pada tahun 2018 BPJS Kesehatan menaikkan iuran yang harus dibayarkan oleh peserta JKN pada peserta mandiri, untuk pelayanan kelas rawat inap I besar iuran yang harus dibayar setiap bulannya adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk kelas rawat inap II Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah), dan kelas rawat inap III Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan.⁴

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 224.149.019 jiwa. Dengan kepesertaan mandiri sejumlah 30.248.656 jiwa.⁵

Kepesertaan mandiri yang terus mengalami peningkatan bertolak belakang dengan keteraturannya dalam membayar iuran JKN. Sampai bulan Oktober 2014, sekitar 13.000 jiwa (40%) dari seluruh peserta mandiri, tidak teratur dalam membayar iuran bulanan. Akibatnya sekitar 3 miliar rupiah uang iuran bulanan tidak terbayar. Padahal, total pengeluaran BPJS Kesehatan untuk membiayai peserta yang sakit, sebelas kali lipat lebih besar dari angka pemasukan yang diterima dari premi peserta mandiri.⁶

Komponen terpenting untuk memudahkan pemanfaatan pelayanan kesehatan, yaitu kepatuhan dalam membayar iuran JKN bagi peserta mandiri. Pembayaran iuran setiap bulannya maksimal tanggal 10. Peserta yang terlambat dalam melakukan pemayaran status kepesertaannya akan diberhentikan sementara dan akan didenda

sebesar 2,5% dari biaya pelayanan setiap bulan yang tertunggak.⁷

Di Kota Tangerang Selatan pada bulan Juni tahun 2019 peserta BPJS Kesehatan mencapai 1.407.989 jiwa. Data sekunder yang diperoleh dari BPJS Kesehatan jumlah peserta yang menunggak membayar iuran BPJS Kesehatan dari beberapa kecamatan di Tangerang selatan yang memiliki tunggakan paling tinggi yaitu di Kecamatan Pamulang dengan jumlah 32,484 jiwa, Kecamatan Pondok Aren sebanyak 30,326 jiwa, dan Kecamatan Ciputat sebanyak 23,117 jiwa.⁶

Dari data BPJS Kesehatan tahun 2019, kecamatan dengan jumlah peserta yang menunggak membayar iuran BPJS Kesehatan tertinggi di Kota Tangerang Selatan yaitu di Kecamatan Pamulang. Sedangkan Kelurahan tertinggi di Kecamatan Pamulang yaitu di Kelurahan Benda Baru dimana jumlah peserta yang menunggak membayar iuran BPJS Sebesar 4.586 jiwa. Dengan demikian diperlukan informasi faktor-faktor apa saja yang Memengaruhi kepatuhan membayar iuran BPJS di Kelurahan Benda Baru tahun 2019.⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sihalohe tahun 2015, terdapat beberapa faktor yang memiliki hubungan dengan kemauan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mandiri yaitu pendapatan, mutu pelayanan dan kemampuan membayar iuran.⁸

Sedangkan menurut Rismawati tahun 2017 faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan kepatuhan membayar BPJS mandiri adalah pendapatan, persepsi dan motivasi.⁹

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi *cross-sectional*. Sampel sebesar 102 peserta BPJS Kesehatan yang diambil dengan teknik *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer (diambil dengan menggunakan alat ukur kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas) dan data sekunder. Variabel independen yang diteliti yaitu pendidikan, pendapatan, pengetahuan, motivasi, dan persepsi. Variabel dependen yaitu kepatuhan membayar BPJS. Analisis data dilakukan dengan uji *chi-square*.

Hasil

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden

Kategori Karakteristik Responden	Jumlah (n)	Presentase %
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	30	29,4
Perempuan	72	70,6
Pendidikan		
Tidak Sekolah	4	3,9
SD	17	16,7
SMP	16	15,7
SMA	50	49,0
Perguruan Tinggi	15	14,7
Pekerjaan		
Tidak Bekerja	45	44,1
Wiraswasta/Pedagang	24	23,5
Karyawan Swasta	12	11,8
Lain-Lain (Buruh, Petani, Tukang dll)	21	20,6

Berdasarkan hasil statistik pada tabel 1 dapat dilihat bahwa sebagian besar peserta BPJS berjenis kelamin perempuan (70,6%) tingkat pendidikan SMA (49,0%), dan tidak bekerja (44,1%).

Tabel 2 merupakan hasil distribusi responden berdasarkan variabel dependen yaitu kepatuhan membayar iuran BPJS mandiri yang

diperoleh dari 102 responden. Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa responden yang patuh membayar iuran BPJS sebanyak 61 responden (59,8%), sedangkan responden yang tidak patuh membayar iuran BPJS sebanyak 41 responden (40,2%).

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Dependen Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri

Kepatuhan Membayar	Jumlah (n)	Persentase (%)
Patuh	61	59,8
Tidak Patuh	41	40,2
Total	102	100,0

Tabel 3 dari 102 responden menunjukkan bahwa sebesar 65,7% responden memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, responden yang memiliki pendapatan \geq UMR (Rp. 3.750.936) sebanyak 50,0% , responden yang memiliki pengetahuan tinggi sebanyak 64,7%, responden dengan motivasi tinggi sebanyak 69,6%, responden yang memiliki persepsi positif sebesar 57,8%.

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Independen di Kelurahan Benda Baru Tahun 2019

Variabel	Jumlah (n)	Persentase (%)
Pendidikan		
Tinggi	67	65,7
Rendah	35	34,3
Pendapatan		
\geq UMR (Rp. 3.750.936)	52	50,0
$<$ UMR (Rp. 3.750.936)	50	49,0
Pengetahuan		
Tinggi	66	64,7
Rendah	36	35,3
Motivasi		
Tinggi	71	69,6
Rendah	31	30,4
Persepsi		
Positif	59	57,8
Negatif	43	42,2

Berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 4 dari lima variabel (pendidikan, pendapatan, pengetahuan, motivasi, dan persepsi) yang diyakini memiliki pengaruh dengan kepatuhan dalam membayar iuran BPJS kesehatan mandiri, hanya variabel pengetahuan yang memiliki hubungan bermakna dengan kepatuhan membayar iuran BPJS ($p = 0,000$). Untuk variabel pendidikan ($p = 0,275$), pendapatan ($p = 0,519$), motivasi ($p = 0,182$), dan persepsi ($p = 0,085$) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Mandiri.

Tabel 4. Hubungan Variabel Independen dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri di Kelurahan Benda Baru

Variabel	Kepatuhan				Total	<i>p-value</i>	
	Patuh		Tidak Patuh				
	n	%	n	%			
Pendidikan							
Tinggi	37	55,2	30	44,8	67	100	0,275
Rendah	24	68,6	11	31,4	35	100	
Pendapatan							
\geq UMR (Rp. 3.750.963)	29	55,8	23	44,2	52	100	0,519
$<$ UMR (Rp. 3.750.963)	32	64,0	18	36,0	50	100	
Pengetahuan							
Tinggi	57	87,7	8	12,3	65	100	0,000
Rendah	4	10,8	33	89,2	37	100	
Motivasi							
Tinggi	46	64,8	25	35,2	71	100	0,182
Rendah	15	48,4	16	51,6	31	100	
Persepsi							
Tinggi	46	67,6	22	32,4	68	100	0,085
Rendah	15	44,1	19	55,9	34	100	

Pembahasan

Hubungan Pendidikan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS

Berdasarkan hasil uji bivariat, dapat dilihat bahwa responden yang patuh membayar iuran lebih banyak berpendidikan tinggi (55,2%) dengan nilai $p = 0,275$ ($>0,05$), yang

artinya tidak ada hubungan yang bermakna tingkat pendidikan responden dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Makombolon yang menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan seseorang dengan kepatuhan membayar iuran JKN di Wilayah Kerja Puskesmas Ranotana Weru. Peserta JKN dengan pendidikan rendah menganggap bahwa kesehatan merupakan hal yang lebih penting. Dengan adanya program JKN menilai kebutuhan kesehatan dapat terpenuhi.¹⁰

Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dapat lebih memahami, mengetahui manfaat dan kebutuhannya yang dianggap penting, misalnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh negara dengan cara membayar iuran jaminan kesehatan. Sebaliknya jika seseorang memiliki tingkat pendidikan rendah dapat menurunkan keinginannya dalam memnbayar iuran jaminan kesehatan yang disebabkan karena tingkat pemahaman dan pengetahuannya yang masih rendah.¹¹

Hubungan Pendapatan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS

Sakinah, dkk. dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pendapatan dengan kesadaran masyarakat dalam berasuransi memiliki hubungan yang bermakna. Seseorang yang semakin tinggi tingkat pendapatan maka akan semakin sadar untuk mengikuti asuransi dan teratur dalam membayar iuran. Masyarakat yang pendapatannya lebih dari UMR akan

cenderung teratur dalam melakukan pembayaran iuran JKN, sebaliknya jika masyarakat memiliki pendapatan kurang dari UMR akan cenderung tidak teratur dalam melakukan pembayaran iuran JKN.¹²

Sedangkan hasil analisis statistik, dapat dilihat bahwa responden yang patuh membayar iuran lebih banyak pada responden berpendapatan kurang dari UMR (<Rp3.740.963,00) yaitu (64,0%) dengan jumlah 32 responden. Dengan nilai $p = 0,519$ ($>0,05$), yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan responden dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan.

Hasil penelitian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widyanti yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS mandiri pada pasien di RSUD Labuang Haji. Penyebabnya karena beberapa responden yang berpendapatan cukup memilih untuk menjadi pasien umum dibandingkan pasien BPJS Kesehatan sehingga mereka tidak teratur dalam membayar iuran.¹³

Menurut Sakinah tingkat pendapatan memiliki hubungan yang bermakna dengan kesadaran masyarakat dalam berasuransi kesehatan, tingkat kesadaran yang tinggi terhadap asuransi kesehatan dimiliki oleh mereka yang memiliki pendapatan tinggi dan tingkat kesejahteraan menengah keatas.¹²

Seorang peserta asuransi patuh dalam melakukan pembayaran iuran jaminan kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan rendah atau kurang dari UMR lebih tertib atau teratur dalam

melakukan pembayaran iuran jaminan kesehatan karena adanya kebutuhan jaminan akan kesehatan baik untuk dirinya dan keluarganya. Selain itu dipengaruhi oleh biaya berobat yang semakin tinggi sehingga jika tidak mengikuti asuransi akan sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Hubungan Pengetahuan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS

Berdasarkan teori Lawrence Green, terdapat faktor-faktor yang Memengaruhi perilaku manusia dari tingkat kesehatan, meliputi faktor predisposisi, pendukung, dan pendorong. Pengetahuan termasuk dalam faktor predisposisi. Pengetahuan adalah informasi yang diperoleh seseorang yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap informasi yang diperoleh. Peserta yang telah mendapatkan informasi tentang kewajiban sebagai peserta asuransi kesehatan memiliki rasa keinginan yang lebih tinggi untuk membayar iuran sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dibandingkan dengan peserta yang belum mendapatkan informasi tentang kewajiban sebagai peserta.¹¹

Pada hasil analisis statistik, dapat dilihat bahwa responden yang patuh membayar iuran lebih banyak memiliki pengetahuan tinggi (64,7%) dengan nilai $p = 0,000$, yang berarti ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan. Penelitian ini didukung oleh penelitian Chaerunisa bahwa ada pengaruh pengetahuan dengan nilai $p = 0,000$. Peserta dengan pengetahuan cukup baik memiliki

pengaruh terhadap kepatuhan membayar premi BPJS Mandiri 7.059 kali lebih besar dari pada peserta yang memiliki pengetahuan kurang.¹³ Hasil penelitian diperkuat dengan penelitian Mokolomban yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kepatuhan iuran JKN mandiri ($p = 0,023$).¹⁰

Adanya pengetahuan, individu dapat mempertimbangkan apakah dengan melakukan kepatuhan membayar iuran dapat menghindarkan mereka dari sanksi atau denda yang telah ditetapkan oleh pihak BPJS. Masyarakat yang memiliki pengetahuan tinggi, memiliki informasi yang baik mengenai pentingnya berasuransi dan manfaat yang akan diperoleh dari asuransi sehingga meningkatkan kesadaran dalam keteraturan membayar iuran jaminan kesehatan. Sebaliknya masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah akan cenderung tidak teratur dalam melakukan pembayaran iuran jaminan kesehatan karena kurangnya informasi mengenai kepentingan berasuransi dan manfaat yang diperoleh jika mengikuti asuransi serta tidak mengetahui adanya denda jika telat melakukan pembayaran iuran jaminan kesehatan.

Hubungan Motivasi dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS

Salah satu faktor pendorong dalam teori Lawrence Green adalah motivasi. Motivasi merupakan dorongan dari dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau berperilaku.¹⁴ Menurut Iriyani tahun 2016, keinginan seseorang untuk melakukan pembayaran iuran kesehatan sangat dipengaruhi

oleh motivasi yang dimiliki oleh orang tersebut. Motivasi dapat dipicu oleh berbagai hal, baik yang positif maupun negatif. Motivasi positif dalam membayar iuran kesehatan mungkin saja timbul pada saat seseorang benar-benar ingin mendapatkan jaminan kesehatan, misalnya ketika mereka sakit atau pada saat pendapatan mereka sedang tinggi. Sementara itu motivasi negatif karena alasan tertentu misalnya peserta belum mengetahui secara jelas tentang peraturan, ketentuan dan manfaat yang diterima.¹⁵ Pada hasil analisis statistik, dapat dilihat bahwa responden yang patuh membayar iuran lebih banyak memiliki motivasi tinggi, yaitu (64,8%) dengan jumlah 46 responden. Dengan nilai $p = 0,182 (>0,05)$, yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi responden dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan.

Hasil penelitian bertolak belakang dengan penelitian Rismawati dkk yang menyatakan bahwa ada hubungan antara motivasi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS mandiri.⁹

Motivasi atau dukungan dari petugas, dan orang terdekat sangat penting karena kemampuan seseorang untuk membayar iuran sangat tergantung dari bagaimana petugas memberikan pelayanan serta informasi yang dibutuhkan dan bagaimana keluarga dan orang terdekat memberikan dukungan kepada peserta untuk membayar iuran BPJS tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan.

Hubungan Persepsi dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS

Informasi/rangsangan yang pertama kali diperoleh masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembentukan persepsi seseorang terhadap kebutuhan untuk memperpanjang kepesertaan dan keteraturan/kepatuhan dalam membayar iuran.¹³ Pada hasil analisis statistik diketahui bahwa responden yang patuh membayar iuran lebih banyak memiliki persepsi positif, yaitu (57,8%) dengan nilai $p = 0,085 (>0,05)$, yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi responden dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Rismawati tahun 2017 yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara persepsi JKN dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Mandiri.⁹

Masyarakat yang mempunyai persepsi positif terhadap tempat pelayanan kesehatan yang memiliki kerja sama dengan asuransi yang diikutinya akan memiliki kesadaran dalam keteraturan membayar iuran jaminan kesehatan karena telah mendapatkan pengalaman menerima pelayanan yang baik dari tempat pelayanan kesehatan. Dengan demikian, perlu adanya koordinasi antara tempat pelayanan kesehatan dengan pihak asuransi untuk menciptakan persepsi positif sehingga terjadinya keteraturan dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan/asuransi.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Mandiri di Kelurahan Benda Baru ($p = 0,000$), sementara itu untuk variabel pendidikan, pendapatan, motivasi, dan persepsi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS mandiri ($p > 0,05$).

Dengan demikian, pengetahuan memiliki peran yang sangat penting terkait dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar iuran BPJS tepat waktu, sehingga perlu adanya sosialisasi secara berkala dari petugas BPJS Kesehatan untuk mengingatkan kepada masyarakat mengenai informasi pembayaran iuran tepat waktu, juga perlu adanya sosialisasi mengenai sanksi jika telat atau tidak membayarkan iuran, dan sebaiknya BPJS mengembangkan upaya untuk memberikan pemberitahuan pembayaran iuran kepada peserta seperti melalui media, misalnya melalui sms.

Daftar Pustaka

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Disitasi pada tanggal 09 Januari 2020 pukul 15.20 WIB : <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/20e67493084e6d2e600888b1dd9f94f4.pdf>
2. Thabrany, Hasbullah. (2014). Jaminan Kesehatan Nasional Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Disitasi pada tanggal 09 Januari 2020 pukul 15.25 WIB: <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/590317c3efc281c57e46912bd26423d9.pdf>
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Diakses pada tanggal 09 Januari 2020 pukul 15.00 WIB : <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/82TAHUN2018PERPRES.pdf>
5. Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Sosial Kesehatan. (2014). Data Kepesertaan dan Keuangan. Disitasi pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 15.00 WIB : <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs>.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Kesehatan. (2019). Data Kepesertaan Nasional. Disitasi pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 15.00 WIB : <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs>.
7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegawatdaruratan dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat. Diakses pada tanggal 09 Januari 2020 pukul 15.15 WIB: <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/arsip/view/1355>.
8. Sihaloho, EN. (2015). Determinan Kemauan Membayar Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri di Wilayah

- Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang.
Disitasi pada tanggal 24 Februari 2020
pukul 15.22 WIB:
<https://lib.unnes.ac.id/23494/1/6411411106.pdf>
9. Rismawati, Lisnawaty, & Jufri, N. N. (2017). Factors Related With Compliance Paying Of Bpjs Mandiri Insurance/ Contribution In The Working Area Of Batalaiworu Public Health Center In 2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*. Vol. 2/No.8/ November 2017; Issn 2502-731x. Disitasi pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 12.00 WIB : <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIMKESMAS/article/view/3899>.
 10. Mokolomban, C., Mandagi, C. K. F., & Korompis, G. E. C. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Peserta Mandiri Dalam Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja Puskesmas Ranotana Weru Kota Manado. *Jurnal KESMAS*. Vol. 7/No. 4/ Juli 2018. Disitasi pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 12.00 WIB : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kemas/article/view/23146>.
 11. Pratiwi, A.N. 2016. Faktor yang Memengaruhi Keteraturan Membayar Iuran pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kategori Peserta Mandiri (Studi Kasus Pasien Rawat Inap Rumah Sakit dr. Soebandi Kabupaten Jember), Universitas Jember Digital Repository. Universitas Jember, Jember. Diakses pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 11.25 WIB: [e/123456789/73502/112110101084--Arfiliyah%20Nur%20Pratiwi-1-80.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73502/112110101084--Arfiliyah%20Nur%20Pratiwi-1-80.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
 12. Sakinah, U., Wijasa, & Wiharto, M. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kesadaran Masyarakat Kelurahan Poris Gaga Tangerang Dalam Berasuransi Kesehatan. *Forum Ilmiah Jurnal Bunga Rampai*. Vol. 11/No.02/2014; ISSN : 1693-446. Disitasi pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 12.00 WIB : <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/880>
 13. Widyanti, Novia. (2018). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri Pada Pasien di RSUD Labuang Baji Kota Makassar. Makassar: Universitas Hasanudin. Disitasi pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 10.00 WIB : http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTVkyZIxMDYzM2I0YTViYTgzOGZlYzgwNjI3OWQ1OTE0N2M2ZTRkMw==.pdf.
 14. Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. Disitasi pada tanggal 20 Januari 2020.
 15. Iriyani. (2016). Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Premi Dan Pengelolaan Dana Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Universitas Hasanuddin. Disitasi pada tanggal 28 Januari 2020.